



PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PERLINDUNGAN HIV/AIDS DI KOTA TANJUNG BALAI

Ismail ¹, Andreansyah Sitorus ², Khairul Akmal Panjaitan ³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran Naga

Email: ¹ ismailizu28@gmail.com, ² andreansyah.sitorus@gmail.com, ³ khairul.akmal.panjaitan@gmail.com,

ABSTRAK

Masalah HIV/AIDS menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Kota Tanjung Balai. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap penderita HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk intervensi atau masukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah mengimplementasikan berbagai program seperti sosialisasi, layanan konseling dan tes HIV secara sukarela (VCT), serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, stigma sosial, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan partisipatif agar upaya perlindungan dan penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, HIV/AIDS, Perlindungan, Penanggulangan, Tanjung Balai.

Abstract

An abstract is a brief summary of a research article, thesis, review, conference proceeding or any-depth HIV/AIDS remains a serious public health issue in Indonesia, including in the city of Tanjung Balai. Local governments play a vital role in efforts to prevent and protect against the spread of HIV/AIDS. This study aims to examine the contributions and interventions made by the local government in addressing HIV/AIDS-related problems. A descriptive qualitative method was used through field studies and document analysis. The findings show that the local government, through the Health Office, has implemented several programs such as public education, voluntary counseling and testing (VCT) services, and partnerships with non-governmental organizations. However, there are still several challenges, including limited funding, persistent social stigma, and low community participation. A more integrated and participatory strategy is needed to enhance the effectiveness of HIV/AIDS prevention and protection efforts.

Keywords: Local Government, HIV/AIDS, Protection, Prevention, Tanjung Balai.

A. Pendahuluan

HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang hingga saat ini masih menjadi ancaman bagi kesehatan global, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus HIV/AIDS terus mengalami peningkatan, termasuk di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Tanjung Balai. Kondisi ini menuntut peran aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, dalam melindungi masyarakat dan menanggulangi penyebaran penyakit tersebut.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penanganan HIV/AIDS memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi medis, edukatif, maupun sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai masukan atau peran Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai dalam penanggulangan dan perlindungan terhadap penderita HIV/AIDS. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu **wawancara mendalam** dengan

informan dari Dinas Kesehatan, petugas Puskesmas, serta perwakilan dari LSM yang bergerak di bidang HIV/AIDS. Selain itu, dilakukan **observasi langsung** terhadap pelaksanaan program di lapangan, seperti kegiatan penyuluhan dan pelayanan VCT (Voluntary Counseling and Testing). Peneliti juga mengumpulkan **dokumen-dokumen pendukung**, seperti laporan tahunan dinas, data statistik, dan peraturan daerah yang berkaitan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara kontekstual dinamika kebijakan dan pelaksanaan program HIV/AIDS di tingkat lokal.

C. Hasil Dan Pembahasan

Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tanjung Balai tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga persoalan hukum dan kebijakan publik. Pemerintah daerah memiliki dasar kewenangan dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap masyarakat, termasuk penderita HIV/AIDS, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa urusan kesehatan merupakan bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Tanjung Balai berkewajiban menyusun

kebijakan strategis yang bersifat preventif dan promotif guna menekan angka penyebaran HIV/AIDS.

Dari sisi regulasi sektoral, **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** juga menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan layanan khusus bagi penderita penyakit menular seperti HIV/AIDS. Pasal 48 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang benar dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai telah menjalankan amanat ini dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan berbasis masyarakat, serta penyediaan layanan konseling dan tes sukarela (VCT) yang bersifat gratis dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain undang-undang nasional, kebijakan dalam bentuk **Peraturan Daerah (Perda)** dan **Peraturan Walikota (Perwal)** juga memiliki peran penting sebagai payung hukum pelaksanaan teknis program HIV/AIDS. Di Kota Tanjung Balai, meskipun belum terdapat Perda khusus tentang penanggulangan HIV/AIDS, namun kebijakan tersebut diakomodasi melalui **program Rencana Strategis Daerah (Renstra)** Dinas Kesehatan dan **Rencana Aksi Daerah (RAD) HIV/AIDS** yang melibatkan lintas sektor. Dalam dokumen tersebut, telah dirumuskan langkah-langkah seperti peningkatan akses layanan kesehatan, pembentukan kelompok pendukung

ODHA, serta kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk pendampingan dan pemberdayaan.

Pemerintah daerah juga telah membentuk **Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)**, yang memiliki kedudukan strategis sebagai wadah koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait. KPAD ini berperan dalam merumuskan kebijakan lokal, mendorong keterlibatan tokoh agama dan adat, serta memastikan adanya keadilan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Peran KPAD sangat penting karena HIV/AIDS bukan hanya masalah medis, tetapi berkaitan erat dengan hak asasi manusia, diskriminasi, dan perlindungan hukum terhadap ODHA.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala hukum dan struktural. Salah satu hambatan utama adalah **belum adanya regulasi daerah yang spesifik dan mengikat** yang mengatur perlindungan terhadap ODHA dan kewajiban pelayanan dari fasilitas kesehatan secara rinci. Tanpa payung hukum daerah yang kuat, pelaksanaan program sering kali bergantung pada kebijakan kepala dinas atau proyek temporer dari pusat, yang tidak berkelanjutan. Selain itu, **rendahnya literasi hukum masyarakat** menyebabkan masih banyak pihak yang memperlakukan ODHA secara diskriminatif, padahal perlakuan demikian bertentangan dengan **Prinsip Non-Diskriminasi dalam Pasal 28D UUD 1945** serta amanat **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun**

2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam penanggulangan HIV/AIDS telah berjalan pada jalur yang benar, namun masih perlu diperkuat melalui pendekatan hukum yang lebih jelas dan berkelanjutan. Pembentukan Peraturan Daerah yang secara eksplisit mengatur hak-hak ODHA, kewajiban instansi terkait, dan sanksi bagi pihak yang melakukan diskriminasi sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif. Langkah ini juga akan mendukung pencapaian tujuan nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS secara merata di seluruh daerah, termasuk di tingkat kota/kabupaten.

I. Kesimpulan

Masukan dan peran Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai dalam penanggulangan HIV/AIDS telah berjalan melalui berbagai program seperti VCT, penyuluhan, dan kerja sama dengan LSM. Namun, tantangan seperti stigma, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama. Upaya yang

lebih sistematis dan terintegrasi sangat diperlukan untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS secara efektif.

J. Daftar Pustaka

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.

Pemerintah Kota Tanjung Balai. (2023). Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai Tahun 2021–2026. Tanjung Balai: Dinas Kesehatan.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 144.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244.

UNDP Indonesia. (2020). HIV and Human Rights in Indonesia: Progress and Challenges. Jakarta: United Nations Development Programme.

Yayasan Spiritia. (2022). Laporan Tahunan HIV/AIDS di Indonesia. Jakarta: Spiritia Foundation.